

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM
PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA OLEH PERUSAHAAN SWASTA
DI KOTA KUPANG**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



YENI LUSIANA BEATRIKS KWUTA

51118019

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Sabtu* Tanggal *DuapuluhLima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yeni Lusiana Beatriks Kwuta
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 18 Juni 1999
N I M : 51118019
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pemberian Upah Minimum Kota Oleh Perusahaan Swasta di Kota Kupang".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Ferdinandus Lobo, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dewi Warti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

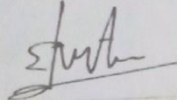
LEMBARAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM
PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA OLEH PERUSAHAAN
SWASTA DI KOTA KUPANG**

NAMA MAHASISWA : YENI LUSIANA BEATRIKS KWUTA
NOMOR REGISTRASI : 51118019
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

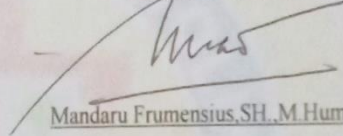
DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, SH., M. Hum
NIDN.0816048201

PEMBIMBING II



Mandaru Frumensius, SH., M. Hum
NIDN.0827045401

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**



Dr. Yustinus Pedro, SH., M. Hum
NIDN.0807066202

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**



Dwiyanti Widiyanti Rabawati, SH., M. H
NIDN.0019056216

MOTTO

*"Hadapi segala sesuatu dengan
mengandalkan TUHAN dan
imani bahwa pertolongan-Nya pasti
tepat pada waktu-Nya"*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapa Drs. Stefanus Kwuta, dan Mama Maria Nino, S.IP yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan Saudariku tersayang, Benedikta Viviana Kwuta dan Adik Wiliyam Muda.
3. Kepada Opa, Oma, Tanta dan Om serta keluarga besar Ume Mese Kab Mafon dan Keluarga besar di Larantuka yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Khususnya kaka Yulius, terima kasih banyak telah membantu penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mandaru Frumensius, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ferdinandus Lobo, SH.,M.Hum, selaku penguji I, Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku penguji II dan Ibu Ernesta Uba

Wohon, S.H.,M.Hum, selaku penguji III yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran sehingga membantu penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotifasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan seluruh staf administrasi yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama masa perkuliahan.
9. Pegawai Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian juga bantuan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 18 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN BERITA ACARA	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.4.2.1 Bagi Penulis	4
1.4.2.2 Bagi Akademisi	4
1.4.2.3 Bagi Masyarakat Luas	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	6
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	6
2.1.3 Teori Pengawasan	9
2.1.4 Teori Kesejahteraan	9
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan	11

2.2.1.1 Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan	13
2.2.1.2 Lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan	15
2.2.1.3 Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan	18
2.2.1.4 Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan	19
2.2.1.5 Macam-Macam Pengawasan Ketenagakerjaan	23
2.2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengawasan Ketenagakerjaan	23
2.2.1.7 Syarat-Syarat Pengawasan Ketenagakerjaan	24
2.2.2 Upah Minimum Kota	24
2.3 Alur Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Metode Penelitian	28
3.3 Spesifikasi Penelitian	28
3.4 Lokasi Penelitian	31
3.5 Populasi Dan Sampel	31
3.6 Jenis Dan Sumber Data	31
3.7 Metode Pengumpulan Data	32
3.8 Metode Pengolahan	32
3.9 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Data Sekunder	34
4.1.1.1 Studi Dokumen	34
4.1.1.1.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang	34
4.1.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang	34
4.1.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang	36
4.1.1.2 Peraturan Perundang-Undangan	37
4.1.2 Data Primer	41
4.1.2.1 Wawancara Bersama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	42

4.1.2.2 Jawaban Pengusaha dan Tenaga Kerja Mengenai adanya Pemeriksaan di Perusahaan atau tempat kerja, Penindakan Korektif Represif dan Penindakan Korektif Preventif oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang	46
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Menyusun Rencana	48
4.2.2 Adanya pemeriksaan Langsung di Perusahaan atau di tempat kerja	49
4.2.3 Adanya penindakan Korektif Preventif atau Represif	50
4.2.4 Laporan hasil pemeriksaan oleh pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang	51
4.2.5 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga kerja pada perusahaan swasta di Kota Kupang	52
4.2.6 Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga kerja pada perusahaan swasta di Kota Kupang	53
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam mengawasi pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh perusahaan swasta di Kota Kupang. Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan di Kota Kupang yang belum membayar upah sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan, padahal dari pihak Dinas sudah mengamanatkan kepada setiap perusahaan agar memberikan upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 404/KEP/HK/2021 tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian UMK oleh perusahaan swasta di Kota Kupang? Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian UMK oleh Perusahaan Swasta di Kota Kupang.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian Upah Minimum Kota oleh Dinas Tenaga Kerja pada perusahaan swasta di Kota Kupang belum dilakukan secara optimal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menyusun rencana kerja, adanya pemeriksaan langsung di perusahaan, penindakan korektif preventif atau represif adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan apabila ditemukan suatu pelanggaran dari peraturan maka harus dibuat nota pemeriksaan dan juga adanya pelaporan hasil pemeriksaan adalah bukti bahwa pengawas yang bersangkutan telah menjalankan tugas. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan yaitu terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, kurangnya sosialisasi dari Dinas terhadap pihak karyawan maupun manajemen perusahaan, tidak kesesuaiannya laporan atau informasi mengenai pengupahan Pegawai, pihak manajemen perusahaan kurang sigap dalam memberikan perintah untuk memperbaiki laporan yang kurang atau salah. Dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu memaksimalkan pegawai yang ada dengan melakukan peningkatan potensi, melakukan sosialisasi dan pemahaman dengan melakukan pembinaan terhadap karyawan maupun pihak manajemen perusahaan, memverifikasi serta laporan dengan relita yang ada dilapangan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam pemberian UMK oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang belum dilaksanakan secara optimal. Faktor utama yang menjadi kendala yaitu terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, kurangnya sosialisasi dari Dinas terhadap pihak karyawan maupun manajemen perusahaan, tidak kesesuaiannya laporan atau informasi mengenai pengupahan Pegawai, pihak manajemen perusahaan dalam memberikan perintah untuk memperbaiki laporan yang kurang atau salah. maka pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang harus lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap Tenaga Pegawai Dinas agar lebih meningkatkan kompetensi dari setiap pegawainya dan menambah jumlah tenaga pengawas karena wilayah kerjanya cukup luas dan perusahaan yang harus diawasi cukup banyak.